

BAB I

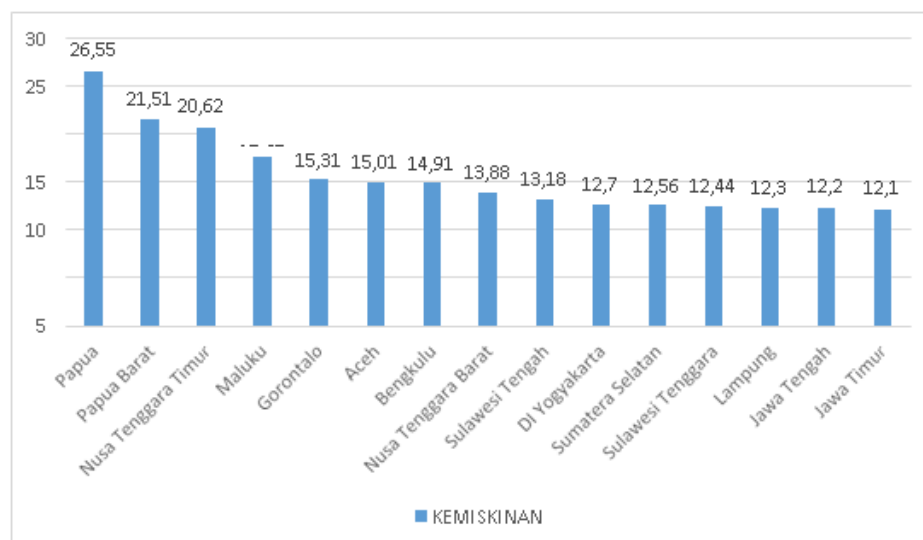
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara mempunyai strategi pembangunan yang diterapkan untuk mendorong kinerja perekonomian dalam mewujudkan terciptanya lapangan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Nasional bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, mengalami kemiskinan (Fauziah et al., 2019).

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang sering menjadi pusat perhatian oleh pemerintah Indonesia saat ini dan menjadi permasalahan yang sangat penting, sehingga menjadi fokus perhatian pemerintah Indonesia. Berdasarkan Perpres republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) disebutkan bahwa ada tiga masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu salah satunya adalah melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dimana lemahnya perekonomian bangsa terlihat dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antar wilayah, kerusakan lingkungan hidup akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan ketergantungan dalam pangan, keuangan, energi, dan teknologi (RPJMN 2015- 2019).

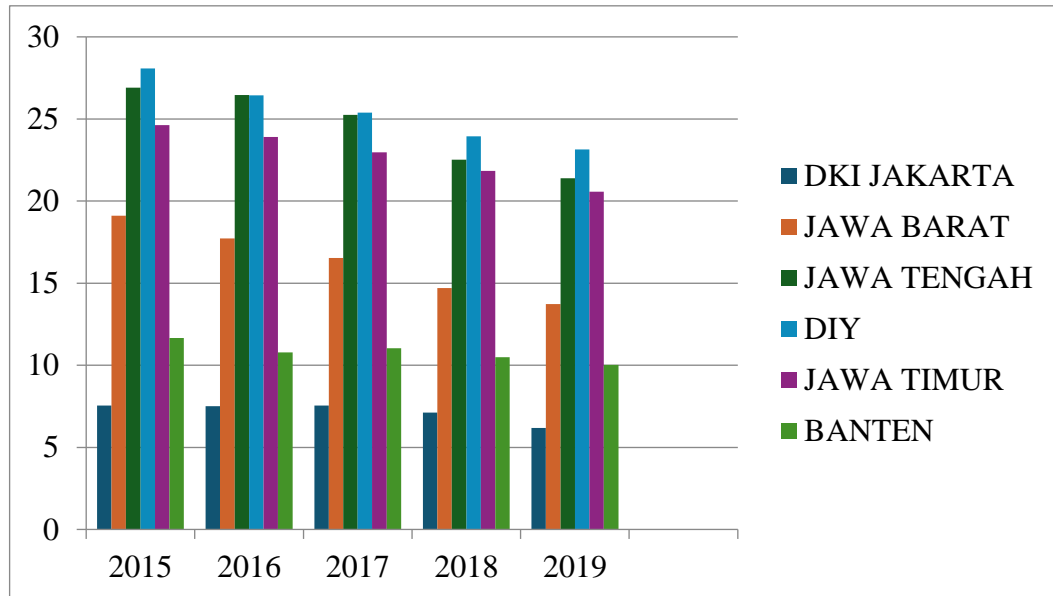
Gambar 1. 1 Gafik Tingkat Kemiskinan 15 Provinsi di Indonesia Tahun 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan Grafik 1.1 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2019 masih ada sebanyak 15 Provinsi yang masih berada pada angka kemiskinan diatas satu digit. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS bahwa daerah yang berada pada tingkat kemiskinan diatas satu digit tidak hanya terdapat pada wilayah Indonesia bagian timur saja, tetapi wilayah Indonesia bagian barat juga masih terdaftar dalam tingkat kemiskinan diatas satu digit, walau begitu wilayah Indonesia bagian timur memang masih mendominasi sebagai yang terbesar hingga peringkat kelima dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia, ini menandakan masih adanya kesenjangan wilayah di indonesia. Menurut Robert Chambers, pengertian dari kesenjangan sosial ekonomi adalah dampak yang timbul di dalam masyarakat karena adanya perbedaan kemampuan finansial dan yang lainnya di antara masyarakat yang hidup disebuah wilayah tertentu (Robert Chambers, 1983).

Gambar 1. 2 Grafik Persentase Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Jawa (Persen) Periode Tahun 2011-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik 2019

Grafik diatas menyatakan bahwa proporsi penduduk miskin di Pulau Jawa adalah 9,41 persen pada bulan Maret 2019 dan menurun menjadi 9,22 persen pada bulan September 2019. Dengan 8,29 persen penduduknya hidup dalam kemiskinan, Pulau Jawa memiliki tingkat tertinggi di pulau mana pun. 12,01 persen penduduknya tinggal di pedesaan, sedangkan 6,36 persen tinggal di perkotaan. Proporsi penduduk miskin di provinsi Pulau Jawa mengalami penurunan setiap tahunnya, seperti terlihat pada grafik 1.2. Sedangkan di Indonesia bagian timur yang rasionya di atas 20 persen, jumlah penduduk miskin lebih sedikit di Provinsi Jawa. Di Provinsi DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, proporsi penduduk miskin melebihi 10 persen.

Kemiskinan di enam provinsi di Pulau Jawa masih cukup tinggi walaupun setiap tahunnya mengalami penurunan yang cenderung lambat.

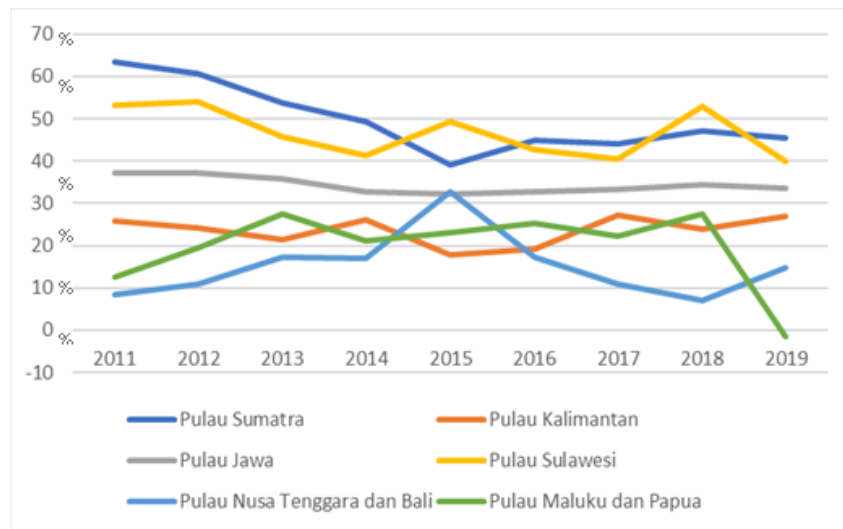
Lambatnya penurunan tersebut menjelaskan bahwa kondisi kemiskinan yang dialami sekitar 30 juta penduduk di Indonesia masih sangat kronis, hingga akhirnya mereka sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Kesenjangan persentase penduduk miskin tersebut disebabkan karena enam provinsi di Pulau Jawa memiliki jumlah kabupaten dan kota yang berbeda. Salah satu tanda penyebab kemiskinan adalah ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan pangan (Hambarasai & Inggit, 2016).

Segala strategi dan kebijakan untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Pulau Jawa telah disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing tetapi tidak membuahkan hasil yang memuaskan, masih ada ketidakcocokan antara harapan dan kenyataan. Kemiskinan tetap menjadi permasalahan yang tidak dapat dihilangkan tetapi dapat dikurangi tingkat persentasenya (Pratama, 2014). Maka dari itu segala faktor penyebab kemiskinan harus terlebih dahulu diketahui sebelum melakukan perencanaan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kondisi masyarakat di setiap wilayah (Wahyuni & Jatmiko, 2019).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan sebagai sebuah proses peningkatan output dari setiap periode. Artinya apabila pembangunan ekonomi suatu negara tersebut berhasil maka akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat, serta jika pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah maka dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

tersebut belum tercapai. Oleh sebab itu saat ini pembangunan ekonomi menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1. 3 Grafik Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2011-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Grafik 1.3 merupakan nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi menurut wilayah di Indonesia dimana diperoleh dengan perhitungan nilai PDRB harga konstan tahun 2010. Berdasarkan nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa cenderung stabil pada tahun 2011 hingga 2019 hal ini dikarenakan Pulau Jawa sebagai kontributor perekonomian nasional mampu tumbuh tinggi diikuti oleh pulau Kalimantan dan Sumatera, serta Bali dan Nusa Tenggara. Oktriutama (2019) menambahkan Pulau Jawa menjadi Pulau terbesar dalam memberikan kontribusi pembentukan PDB nasional, dikarenakan di Pulau Jawa masih banyak terdapat industri besar penghasil komoditas. Sehingga berdasarkan data statistik memang Pulau memiliki nilai yang lebih, dari segi subjek yang diteliti disini yaitu nilai PDRB, Investasi, Tenaga Kerja dan

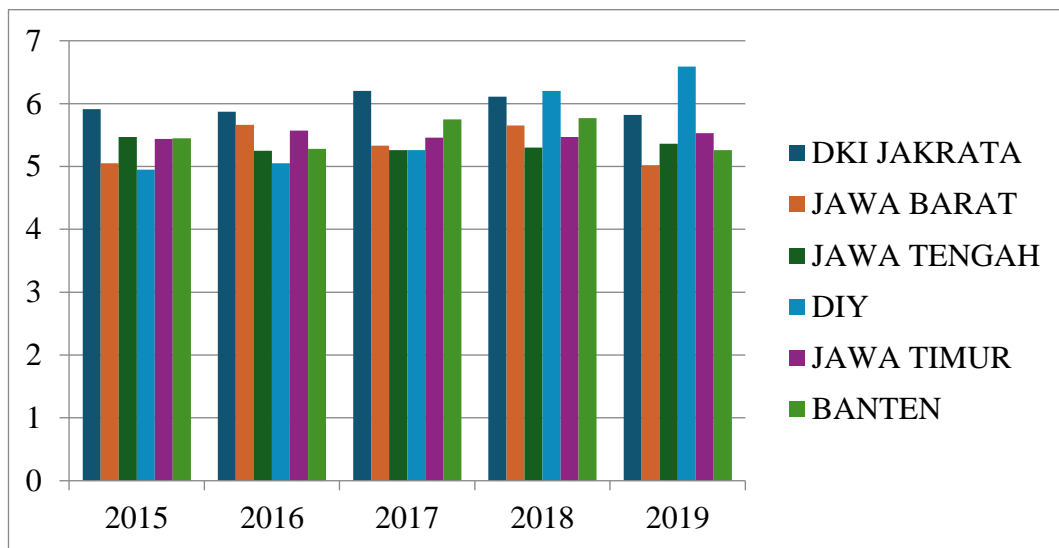
Belanja Modal yang dibandingkan dengan Pulau lain.

Pulau Jawa merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional terbesar di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (2022), pada kuartal II-2022 perekonomian Indonesia tumbuh 5,27 persen. Secara spasial, kelompok provinsi di Pulau Jawa masih merupakan penyumbang ekonomi terbesar yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 58,61 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,54 persen. Pulau Kalimantan sebesar 8,05 persen, Pulau Sulawesi 6,20 persen, Bali dan Nusa Tenggara 3,06 persen serta Maluku dan Papua sebesar 2,54 persen. Meski terhitung paling kecil distribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi kelompok Pulau Maluku dan Papua mencatat pertumbuhan tertinggi pada kuartal II-2022 dibanding pada periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 18,18 persen. Diikuti Pulau Sulawesi 6,73 persen, Pulau Jawa 5,69 persen, Pulau Sumatera 4,65 persen, Bali dan Nusa Tenggara 3,75 persen serta Pulau Kalimantan 3,31 persen.

Bedasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa baik dan relatif stabil dibandingkan dengan wilayah lain yang pertumbuhan ekonominya masih dibawah Pulau Jawa. Sebagai pusat pemerintahan, Pulau Jawa merupakan tempat kedudukan hampir seluruh perangkat pemerintahan tingkat nasional, serta perwakilan negaranegara asing. Sebagai pusat perekonomian, hampir sebagian besar sektor ekonomi beroperasi di Pulau Jawa sehingga menjadikan potensi ekonomi Pulau Jawa termasuk paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Hal ini sebagaimana

terlihat dari besarnya kontribusi PDRB- nya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang menunjukkan sektor sekunder dan tersier memberikan presentase terbesar dari pembentukan PDB nasional (Nur & Rakhman, 2019).

Gambar 1. 4 Grafik Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) Tahun 2015-2019 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik 2019

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan nilai PDRB yang mana dapat digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja pemerintah dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi pada masing-masing enam provinsi di Pulau Jawa bervariasi, naik turun, seperti terlihat pada grafik 1.4. Sepanjang tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa mendominasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. BPS menyebutkan pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa sebesar 59 persen. DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat menyumbang 5,52 persen dari total kontribusi Pulau Jawa pada tahun 2018. 2019, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta mencapai 5,82 persen naik 0,2 persen dari tahun 2018, Jawa Barat mencapai 5,07 persen turun 0,58 persen dari tahun

2018, Jawa Tengah mencapai 5,40 persen naik 0,1 persen dari tahun 2018, DI Yogyakarta mencapai 6,59 persen naik 0,39 persen dari tahun 2018, Jawa Timur mencapai 5,52 persen naik 0,05 persen dari tahun 2018, dan Banten mencapai 5,29 persen turun 0,48 persen dari tahun 2018.

Data tersebut menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja menyebabkan timbulnya ketimpangan dalam pembagian pendapatan (*ceteris paribus*) dan menciptakan peningkatan kemiskinan (Bintang & Woyanti, 2018). Distribusi pendapatan yang merata dan terbukanya kesempatan kerja yang luas merupakan bukti dari pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Ketika pertumbuhan ekonomi naik, maka tingkat partisipasi angkatan kerja juga akan naik, begitupun sebaliknya.

Pengangguran merupakan masalah terbesar bagi suatu negara, karena pengangguran menyebabkan pendapatan dan produktivitas masyarakat rendah yang pada akhirnya akan menimbulkan kemiskinan dan masalah sosial lain. Negara berkembang seringkali dihadapkan pada besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk usia kerja.

Gambar 1. 5 Grafik Tingkat Pengangguraan di Indonesia Tahun 2019

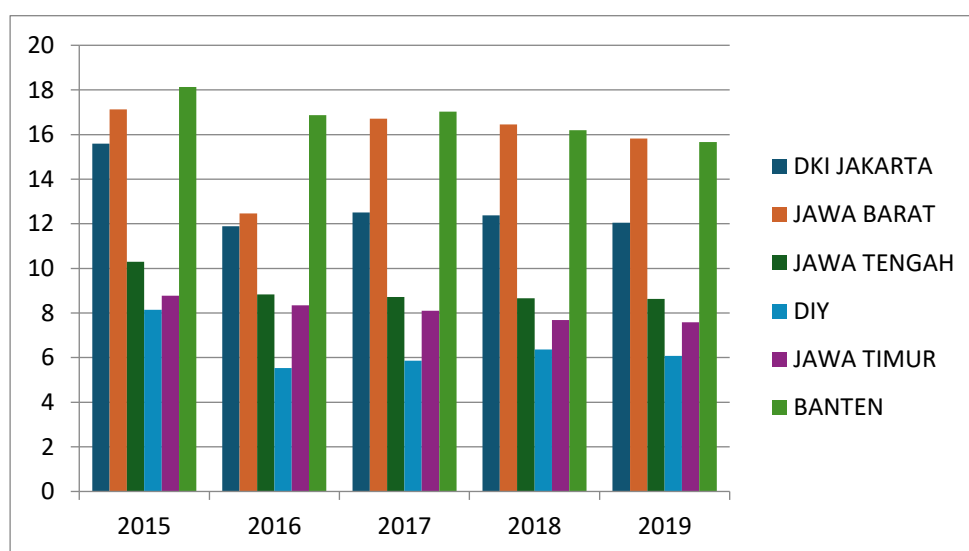


Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Dari data BPS terhitung sampai Februari 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,13 persen dan menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 7,04 juta orang menganggur pada Tahun 2018. Dapat dilihat dari grafik 1.5 diatas bahwa 3 Provinsi di Pulau Jawa masuk dalam 10 besar Pengangguran tertinggi di tingkat Nasional, Serta Banten merupakan Pengangguran tertinggi diikuti dengan Jawa Barat pada posisi keduanya. Ini merupakan masalah besar yang harus dipecahkan oleh pemerintah dan sebagai

penentu arah kebijakan selanjutnya. Seperti diketahui bahwa Pulau Jawa merupakan daerah sentral Indonesia dalam mengelola ekonomi maupun kehidupan sosialnya yang majemuk.

Gambar 1. 6 Grafik Angka Pengangguran Terbuka Provinsi di Pulau Jawa Periode 2015-2019 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik 2019

Grafik 1.6 menampilkan tingkat pengangguran seluruh wilayah Pulau Jawa, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Dari tahun ke tahun, DIY, Jawa Timur, dan Banten mengalami pertumbuhan dari tahun 2015 hingga 2019. Pada tren pengangguran terbuka di Pulau Jawa dari tahun 2015-2019 cenderung mengalami penurunan di setiap kotanya. Tetapi persentasenya masih sangat besar ini menunjukkan bahwa jumlahnya pun masih sangat tinggi, beriringan dengan potensi industri yang ada di daerah tersebut.

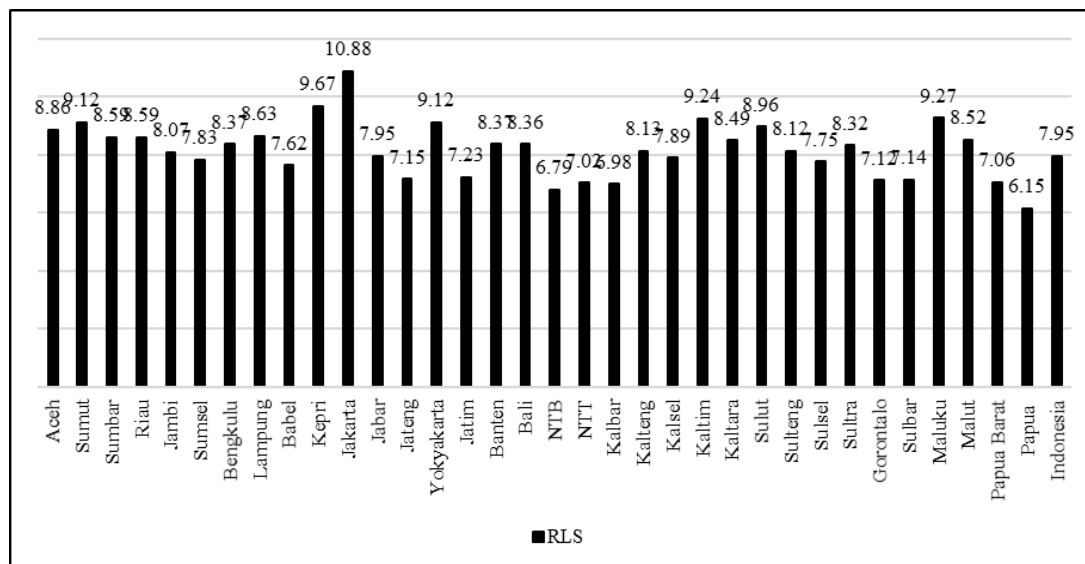
Pulau Jawa merupakan salah satu pulau yang banyak sekali aktivitas perekonomiannya mulai dari perkantoran, industri, pertanian dan lain sebagainya, karena sebagai pusat kesibukan ekonomi di Indonesia. Namun tidak dipungkiri bahwa di Pulau Jawa juga menyimpan banyak pengangguran,

ini karena imbas dari banyaknya kegiatan ekonomi di Pulau Jawa sebagai pulau pusat dari jalannya roda ekonomi yang akhirnya penduduk di luar Pulau Jawa berbondong-bondong mengadu nasib di Pulau Jawa. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa masalah yang dihadapi oleh tenaga kerja di Indonesia diantaranya ketidakcocokan antara kemampuan dan pendidikan angkatan kerja dengan kebutuhan dunia industri.

Secara umum pembangunan suatu negara memiliki dua aspek utama yaitu pendidikan dan kesehatan. Seseorang dengan pendidikan tinggi dan kesehatan fisik yang mendukung akan mudah beradaptasi dengan teknologi yang baru, berbeda dengan seseorang berpendidikan rendah dan kesehatan yang mungkin kurang mendukung akan kesulitan beradaptasi dengan kecanggihan teknologi. Produktivitas akan berdampak pada perolehan pendapatan yang akan diterima oleh orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga (Aji et al., 2020).

Alasan mengapa pendidikan sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berasal dari teori modal manusia Becker tahun 1964. Masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi akan mendapatkan gaji yang layak, sehingga memungkinkan mereka untuk keluar dari kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu metrik yang digunakan BPS untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Pendekatan HDI baru dalam mengukur pendidikan melihat rata-rata lama sekolah dan aspirasinya. Rata-rata lamanya seseorang menyelesaikan program pendidikan reguler disebut rata-rata lama sekolah (RLS).

Gambar 1. 7 Grafik Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Indonesia Tahun 2016



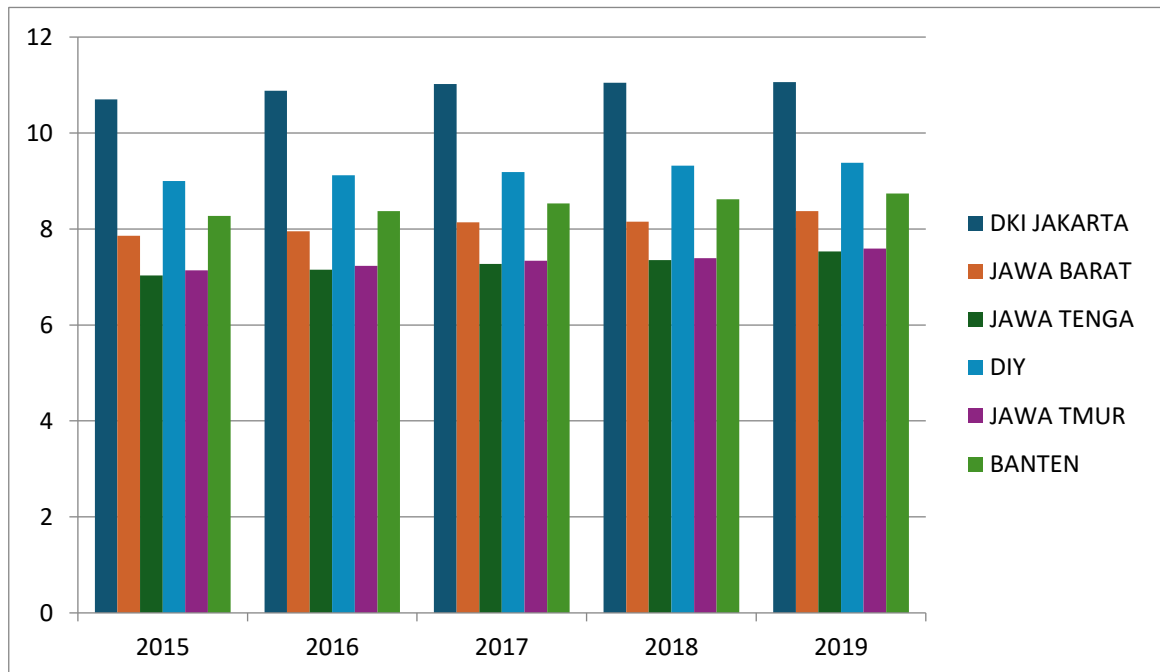
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan grafik 1.7 di atas dapat disimpulkan angka Rata-Rata Lama Sekolah di Indonesia mencapai 7,81 persen selama periode tahun 2011 – 2019. Itu berarti masyarakat di Indonesia hanya dapat menyelesaikan pendidikan formal pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Grafik selanjutnya menjelaskan kondisi pendidikan di masing-masing provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2015 hingga 2019. Rata-rata lama sekolah di provinsi Pulau Jawa pada tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan adanya peningkatan, meskipun tidak terlalu cepat. Rata-rata lama sekolah selama lima tahun terakhir di DKI Jakarta adalah 11 tahun, setara dengan kelas 2 Sekolah Menengah Atas (SMA); 8 tahun untuk Jawa Barat setara kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP); 7 tahun untuk Jawa Tengah setara kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP); 9 tahun untuk DI Yogyakarta setara kelas 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP); 7 tahun untuk Jawa Timur setara kelas 1

Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan 8 tahun untuk Banten.

Gambar 1. 8 Grafik Angka Rata-Rata Lama Sekolah Di Pulau Jawa Tahun 2011-2019 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik 2019

Nilai Rata-rata Lama Sekolah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti terlihat pada grafik 1.8 di atas. Meskipun terjadi peningkatan pendidikan setiap tahun di pulau Jawa, rata-rata lama sekolah di sejumlah provinsi kurang dari sembilan tahun, dengan masa sekolah terlama adalah delapan tahun di Jawa Barat, tujuh tahun di Jawa Tengah, tujuh tahun di Jawa Timur, dan delapan tahun di Banten. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Pulau Jawa masih cukup rendah. Hal ini mungkin terjadi karena kesulitan keuangan atau kurangnya dana sekolah. Karena mereka menganggap pendidikan tidak penting, masyarakat lebih memilih bekerja meski gajinya rendah. Antara tahun 2011 dan 2019, rata-rata lama sekolah meningkat sangat

sedikit. Karena rendahnya kualitas pendidikan yang mengakibatkan rendahnya produktivitas dan terbatasnya pilihan karir, pendeknya rata-rata lama sekolah berdampak pada terbatasnya pengembangan diri dan berkontribusi terhadap semakin meningkatnya kemiskinan di pulau Jawa (Fauziah et al., 2019) .

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai tingkat kemiskinan di Pulau Jawa dikarenakan enam provinsi di Pulau Jawa yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat namun juga memiliki ketimpangan yang sangat tinggi hal tersebut dikarenakan Pulau Jawa merupakan wilayah padat penduduk, pusat perekonomian dan administratif negara. Lalu selama periode tahun 2011-2019 Provinsi di Pulau Jawa mendominasi 10 Provinsi dengan angka persentase tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Selain itu didalam penelitian ini juga akan melihat bagaimana pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguraan, dan Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah) terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguraan, Pendidikan (RLS) Terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan masing-masing provinsi di Pulau Jawa tahun 2011-2019?

2. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap Kemiskinan masing-masing provinsi di Pulau Jawa tahun 2011-2019?
3. Bagaimana pengaruh pendidikan yang direpresentasikan oleh Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Kemiskinan masing-masing provinsi di Pulau Jawa tahun 2011-2019?

C. Tujuan Penelitian

Latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas mengarah pada tujuan sebagai berikut.:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Pulau Jawa pada tahun 2011-2019.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Pulau Jawa pada tahun 2011-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan (RLS) terhadap kemiskinan di Pulau Jawa pada tahun 2011-2019.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut berdasarkan temuannya:

1. Bagi Akademisi

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih rinci untuk memperluas pemahaman dan perspektif akademisi. Selain itu, buku ini juga dimaksudkan untuk menjadi sumber bagi para sarjana masa depan yang ingin mengkaji kembali ekspansi ekonomi, pengangguran, dan pendidikan sebagaimana ditunjukkan oleh rata-rata lama pendidikan di pulau Jawa antara tahun 2011 dan 2019.

2. Bagi Instansi/Lembaga Pemerintah

Instansi dan lembaga pemerintah diharapkan mempertimbangkan temuan studi ini ketika mengembangkan kebijakan atau solusi untuk menurunkan nilai variabel pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan pendidikan yang diwakili oleh rata-rata lama sekolah serta variabel lainnya. tidak termasuk dalam penelitian ini yang mempengaruhi derajat kemiskinan di Pulau Jawa pada tahun 2011 hingga 2019.